

RENCANA KERJA

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan
Bina Areal Preservasi

2025





RENCANA **KERJA**

**DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM
DAN BINA AREAL PRESERVASI
2025**

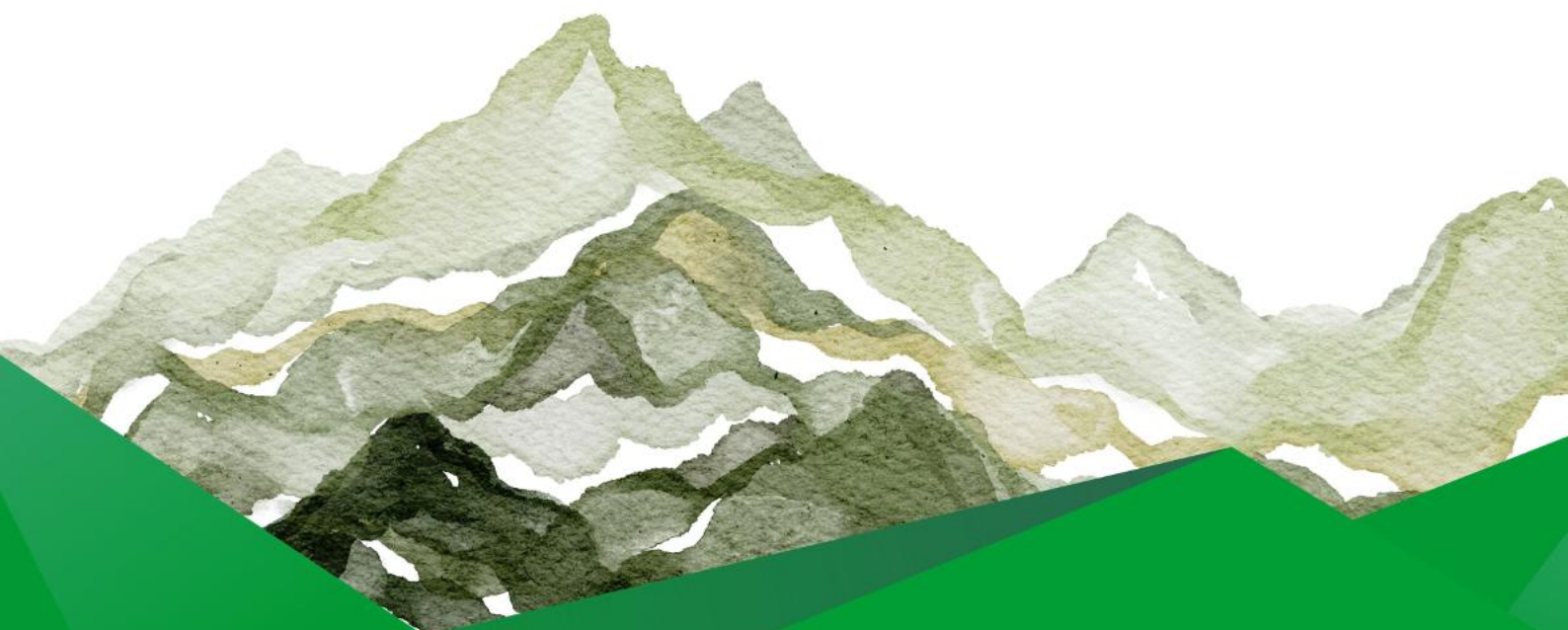


Foto: Pembersihan Alur Sungai BBKSDA Riau



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada rencana dan sasaran strategis nasional tahun 2024-2025, prioritas pembangunan nasional, pagu indikatif, memuat kebijakan, dan kegiatan pembangunan kawasan konservasi yang menjadi pedoman seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Rencana Kerja Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi Tahun 2025 ini disusun sebagai salah satu bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pembangunan, khususnya bidang pengelolaan dan pemulihan ekosistem. Dokumen perencanaan tahunan ini menjadi salah satu instrumen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kehutanan, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Dengan demikian, Rencana Kerja ini merupakan salah satu bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan, dan tertib pelaporan.

Rencana Kerja Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi Tahun 2025 ini merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, sehingga diharapkan alokasi sumber daya yang tepat sasaran, memastikan bahwa anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas dialokasikan pada prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi Tahun 2025-2029, Rencana kerja ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian, monitoring serta untuk menjamin kesinambungan jangka panjang memastikan bahwa pencapaian tahun pertama akan menjadi fondasi bagi tahun kedua, dan seterusnya, sehingga tujuan dan sasaran strategis Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi Tahun 2025-2029 dapat tercapai.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan ini dan penghargaan atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian.

Jakarta, 2025

Direktur Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi



[Signature]
Herly Susyafrianto, MM

Foto: Pembuatan PUP di BBTN Teluk Cendrawasih



DAFTAR ISI

3 KATA PENGANTAR

5 DAFTAR ISI

7 SK RENCANA KERJA 2025

13 BAB I PENDAHULUAN

13 Latar Belakang

14 Maksud dan Tujuan

14 Kelembagaan

16 Dasar Hukum

21 BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

29 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

37 BAB IV PENUTUP

39 LAMPIRAN





Foto: Pemulihan Ekosistem di BBTNBS

KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI
Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Blok VII Lantai 14
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 – Telp./Fax: 021 5746336

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI
No. SK.29/PEAP/12/2025
TENTANG
RENCANA KERJA
DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI
TAHUN 2025
DIREKTUR PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi perlu disusun Rencana Kerja Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi tahun 2025;
- b. bahwa rencana kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi tentang Rencana Kerja Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 1990 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia 1994 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3556);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999

- Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 86, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 97 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4664);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 56 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 330 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5798);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 105 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6056);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 33 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6635);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 34);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2023 tentang

- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 25);
12. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 250);
 13. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 371);
 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 15. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;
 16. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 Tentang Pengesahan Convention On Wetlands of International Importance Especially As Waterfowl Habitat;
 17. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan
 18. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 253);
 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Taman Keanekaragaman Hayati;
 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/Menhut-II/ tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
 23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;\
 25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 1002);

26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI TAHUN 2025
- KESATU : Rencana Kerja Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yaitu tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- KEDUA : Rencana Kerja Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan dan kegiatan pembangunan bidang Konservasi Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi.
- KETIGA : Rencana Kerja Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi Tahun 2025 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2025
Direktur Pemulihan Ekosistem dan
Bina Areal Preservasi,



Letjen Susyafrianto, MM
NIP. 19680404 199603 1 004



Foto: View Gambut di Resor Mangkok, TN Sebangau



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Triple Planetary Crisis merupakan istilah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggambarkan tiga ancaman lingkungan global yang saling berkaitan yaitu perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Bagi Indonesia, krisis ini menjadi ancaman serius mengingat statusnya sebagai negara kepulauan tropis dengan kekayaan hayati tertinggi kedua di dunia yang sangat rentan terhadap dampak seperti kenaikan permukaan laut dan bencana alam.

Secara khusus, degradasi biodiversitas menjadi hambatan besar bagi pembangunan berkelanjutan. Didorong oleh faktor eksploitasi berlebihan, alih fungsi lahan, dan pertumbuhan penduduk, krisis ini mengancam ketahanan pangan serta stabilitas ekonomi. Dengan satu juta spesies di ambang kepunahan secara global, Indonesia pun menghadapi risiko besar; diperkirakan habitat alami kita akan menyusut drastis dari 80,30% (tahun 2000) menjadi hanya 49,70% pada tahun 2045 jika pola pembangunan tetap berjalan tanpa intervensi (Business as Usual).

Pemerintah telah mengalokasikan 120,6 juta hektar atau sekitar 63% dari luas daratannya sebagai kawasan hutan. Kawasan daratan lainnya berupa areal bukan kawasan hutan yang dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). Kawasan

hutan tersebut diklasifikasikan menjadi tiga fungsi, yaitu Hutan Produksi (HP) meliputi areal seluas 68,8 juta hektar atau 57% dari kawasan hutan, Hutan Lindung (HL) meliputi areal seluas 29,6 juta hektar atau 25% dari kawasan hutan. Selain itu, Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen terhadap pelestarian keanekaragaman hayati, salah satunya dengan telah menetapkan Kawasan hutan konservasi seluas kurang lebih 27 juta hektar yang terdiri dari 22,1 juta hektar terestrial dan 5,3 juta hektar perairan laut. Komitmen tersebut sejalan dengan berbagai proses kebijakan di tingkat regional maupun internasional yang turut mengikutsertakan Indonesia, seperti Convention on Biological Diversity (CBD) dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Pengelolaan 27 juta hektar Kawasan konservasi tersebut juga telah didukung secara sistematis dan terencana dengan menetapkan unit-unit pengelola sampai tingkat tapak, penyediaan norma, standar, pedoman dan kriteria serta penyediaan dukungan anggaran. Namun demikian pengelolaan Kawasan konservasi di Indonesia tidak lepas dari berbagai masalah dan tantangan. Salah satu masalah yang cukup penting adalah terdapatnya area-area di dalam Kawasan konservasi yang rusak, yang diakibatkan

secara alami maupun gangguan manusia. Di sisi lain, Laporan Protected Planet mencatat bahwa pada tahun 2018, sekitar 35% Key Biodiversity Area (KBA) sama sekali belum dikelola dalam sistem kawasan lindung. Berdasarkan laporan terbaru (2024), angka ini sedikit membaik menjadi 32%, namun ini tetap menunjukkan bahwa sepertiga area terpenting bagi biodiversitas global masih belum memiliki status perlindungan yang formal.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) telah menetapkan salah satu sasaran rencana strategis tahun 2025-2026 sebagai jawaban atas isu dan masalah tersebut, yaitu “Jumlah spesies yang di asesmen secara nasional dan mendukung IUCN Red List Penurunan status keterancamannya spesies pada IUCN Red list”. Untuk mendukung sasaran dan indikator kinerja program Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat PEBAP dalam Renstra Direktorat PEBAP 2025-2029 dengan visi “Ekosistem yang pulih dan terkoneksi, dengan keanekaragaman hayati yang terjaga untuk mengalirkan manfaat ekologi, ekonomi dan sosial”. menetapkan sasaran kinerja kegiatan adalah meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana kerja ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman operasional bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat PEBAP. Dokumen ini dimaksudkan untuk:

1. Penjabaran Rencana Strategis Direktorat PEBAP periode 2025–2029 ke dalam langkah-langkah nyata tahunan.
2. Memberikan landasan hukum dan teknis dalam pengalokasian anggaran yang

transparan dan akuntabel untuk kegiatan pemulihan ekosistem dan Verifikasi Potensi Areal Preservasi.

Tujuan dari penyusunan rencana kerja:

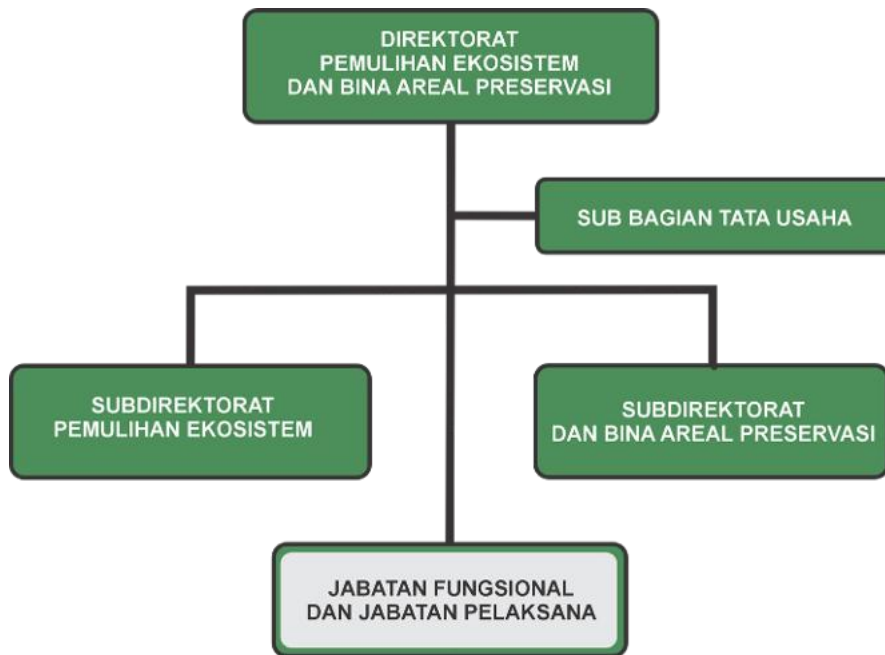
1. Menetapkan target luasan untuk kegiatan pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB;
2. Menetapkan target luasan potensi areal preservasi;
3. Untuk mencapai penggunaan sumber daya (anggaran dan manusia) secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam upaya mengurangi ancaman kepunahan keanekaragaman hayati.
4. Menentukan rincian output kegiatan yang mencerminkan pekerjaan nyata (real work) berdasarkan pagu anggaran yang telah ditetapkan, termasuk pengelolaan dana yang bersumber dari Rupiah Murni maupun PNPB.
5. Menjadi acuan bagi pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan guna memastikan seluruh program berjalan sesuai jadwal.

C. Kelembagaan

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan ekosistem, dan pembinaan pengelolaan areal preservasi.

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan ekosistem, dan pembinaan pengelolaan areal preservasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat PEBAP

- nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, taman buru, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
 3. penyiapan penyusunan standar instrumen di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, taman buru, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
 4. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
 5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi;
 6. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan inventarisasi, pemolaan, serta pembinaan pengelolaan areal preservasi; dan
 7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
- Direktorat PEBAP merupakan bagian dari Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Direktorat PEBAP Terdiri atas :
- 1) Subdirektorat Pemulihan Ekosistem;

2) Subdirektorat Bina Areal Preservasi; 3) Subbagian Tata Usaha; 4) Kelompok Jabatan Fungsional. Direktorat PEBAP memiliki mitra kerja pelaksana teknis dalam melaksanakan kegiatan di lapangan yang terdiri atas Pemerintah Daerah, UPT Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam/Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA/BKSDA) dan Taman Nasional (TN) di bawah komando Ditjen KSDAE disamping Pusat Pengelolaan Ekoregion di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan.

Direktorat PEBAP merupakan eselon II Kementerian Kehutanan dengan jumlah pegawai PNS sebanyak 26 pegawai, CPNS sebanyak 5 pegawai, PPPK sebanyak 10 pegawai dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 2 orang. Komposisi pegawai Direktorat PEBAP berdasarkan jenis kelamin adalah 22 laki-laki dan 21 perempuan. Komposisi pegawai Direktorat PEBAP berdasarkan tingkat pendidikan adalah 2 orang S3, 11 orang S2, 19 orang S1, 7 orang D3, 4 orang SMA/ sederajat.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 1990 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 86, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia 1994 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3556);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 97 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4664);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, & Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 56 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 330 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5798);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 25);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 105 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik



Foto: Burung Madu Jawa (Taufan Kharis)

- Indonesia 2021 Nomor 33 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6635);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 34);
 16. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 250);
 17. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 371);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;
 20. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 Tentang Pengesahan Convention On Wetlands of International Importance Especially As Waterfowl Habitat;
 21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan
 22. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 253);
 23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;



Foto: Burung Migran (BKSDA Yogyakarta)





24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Taman Keanekaragaman Hayati;
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/Menhut-II/ tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 1002);
30. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem;
31. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem;



BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan tanggal 18 Desember 2024, bahwa ada perubahan nomenklatur organisasi dari Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem (Direktorat BPPE) menjadi Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi (Direktorat PEBAP). Sehingga tahun 2024 program pemulihan ekosistem dan pelaksanaan pembinaan pelestarian keanekaragaman hayati di luar hutan konservasi yang saat ini disebut Areal

Preservasi dilaksanakan oleh Direktorat BPPE.

Pencapaian kinerja Direktorat BPPE tahun 2024 didukung dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 8.056.640.000,- yang bersumber dari anggaran Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (KLH). Seiring dengan adanya perubahan kebijakan, pagu alokasi anggaran ikut mengalami revisi guna mendukung pencapaian target. Rincian Perubahan pagu anggaran beserta alokasi anggaran dapat tersaji pada tabel 1.

Tabel 1: Perjalanan pagu alokasi anggaran Tahun 2024

| Tahap Revisi | Perubahan/Keterangan | Alokasi Pagu Anggaran (Rp) |
|-----------------------------|---|----------------------------|
| Awal | Pagu anggaran awal | 8.056.640.000,- |
| Revisi ke-1 | Blokir semua kegiatan teknis | 8.056.640.000,- |
| Revisi ke-2 | Revisi buka Blokir, namun masih terdapat pagu alokasi terblokir sebesar Rp. 207.278.000 pada kegiatan teknis (tidak mengubah total pagu). | 8.056.640.000,- |
| Revisi ke-3 - ke 11 | Revisi pergeseran pagu antar akun/komponen belanja dalam satu program/output, realokasi kegiatan, dan penyesuaian RPD (tidak mengubah total pagu) | 8.056.640.000,- |
| Revisi ke-12 | Revisi penghapusan blokir sebesar Rp. 207.278.000 pada kegiatan teknis dan merubah total pagu | 7.849.362.000,- |
| Revisi ke-13 | Revisi pengurangan pagu alokasi sebesar Rp. 169.000.000,- | 7.680.362.000,- |
| Revisi ke-14 - ke 15 | Revisi pergeseran pagu antar akun/komponen belanja dalam satu program/output, realokasi kegiatan, dan penyesuaian RPD (tidak mengubah total pagu) | 7.680.362.000,- |
| Revisi ke-16 | Revisi pengurangan pagu alokasi sebesar Rp. 206.400.000,- | 7.473.962.000,- |
| Revisi ke-17 - ke 18 | Revisi pergeseran pagu antar akun/komponen belanja dalam satu program/output, realokasi kegiatan, dan penyesuaian RPD (tidak mengubah total pagu) | 7.473.962.000,- |

Realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp7.471.131.277,- atau sekitar 99,96%.

Pencapaian kinerja Direktorat BPPE tahun 2024 diukur melalui pelaksanaan 3 (tiga) indikator kinerja program sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur BPPE dan Direktur Jenderal KSDAE. Pada tahun 2024 rata-rata capaian IKK Direktorat BPPE adalah sebesar 133,33%. Capaian Kinerja Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem dapat tersaji pada tabel 2.

Tabel 2. Capaian Kinerja Direktorat BPPE Tahun 2024

| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Prosentase (%) |
|---------------------------------|---|---|------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Konservasi | Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi | 4.770.000 Hektar | 9.953.269,34 Hektar | 150,00 |
| 2 | Terselenggaranya pembinaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial yang efektif | Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya | 11 Unit KEE | 11 Unit KEE | 100,00 |
| 3 | Meningkatnya pemulihan ekosistem di kawasan konservasi | Luas ekosistem yang dipulihkan | 12.900 Hektar | 29.722,1 Hektar | 150,00 |
| Capaian Kinerja Direktorat BPPE | | | | | 133,33 |

Capaian Kinerja Direktorat BPPE Tahun 2024 dapat dijabarkan dalam kegiatan tiap Indikator kinerja sebagai berikut:

1. IKK Luas Kawasan Yang Diinventarisasi Dan Diverifikasi Dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi Secara Partisipatif Di Luar Kawasan Konservasi

Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi: Direktorat telah berhasil menginventarisasi dan memverifikasi seluas total **9.953.269,34 hektar**. Capaian terbesar berada di

wilayah BKSDA Papua (2.864.441,08 ha), BKSDA Kalimantan Barat (1.853.854,97 ha), dan BKSDA Riau (991.456,83 ha).

Tabel 3. Capaian Luas Kawasan Yang Diinventarisasi Dan Diverifikasi Dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi Secara Partisipatif Di Luar Kawasan Konservasi Tahun 2024

| No | UPT Penanggung Jawab | Capaian (Ha) |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | BKSDA NAD | 153.080,35 |
| 2 | BBKSDA Sumatera Utara | 799.801,95 |
| 3 | BKSDA Sumatera Barat | 372.340,90 |
| 4 | BBKSDA Riau | 991.456,83 |
| 5 | BKSDA Bengkulu dan Lampung | 0,00 |
| 6 | BKSDA Sumatera Selatan | 0,00 |
| 7 | BKSDA Jambi | 0,00 |
| 8 | BKSDA Kalimantan Selatan | 252.121,91 |
| 9 | BKSDA Kalimantan Tengah | 678,92 |
| 10 | BKSDA Kalimantan Timur | 173.323,79 |
| 11 | BKSDA Kalimantan Barat | 1.853.854,97 |
| 12 | BBKSDA Jawa Barat | 0,00 |
| 13 | BKSDA Jawa Tengah | 0,00 |
| 14 | BBKSDA Jawa Timur | 0,00 |
| 15 | BKSDA DIY | 0,00 |
| 16 | BKSDA Jakarta | 351,38 |
| 17 | BBKSDA Sulawesi Selatan | 513.351,00 |
| 18 | BKSDA Sulawesi Tengah | 436.630,05 |
| 19 | BKSDA Sulawesi Tenggara | 36.562,34 |
| 20 | BKSDA Sulawesi Utara | 555.731,33 |
| 21 | BKSDA Bali | 1.427,17 |
| 22 | BKSDA NTB | 0,00 |
| 23 | BBKSDA NTT | 0,00 |
| 24 | BKSDA Maluku | 153.909,13 |
| 25 | BBKSDA Papua | 2.864.441,08 |
| 26 | BBKSDA Papua Barat | 794.206,24 |
| Total | | 9.953.269,34 |

2. IKK Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial Yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE): Target 11 unit KEE telah tercapai 100% efektivitas pengelolaannya.

Tabel 4. Capaian Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial Yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya Tahun 2024

| Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target | Realisasi | Persentase |
|--|--|-------------|-------------|------------|
| Terselenggaranya pembinaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial yang efektif | Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya | 11 Unit KEE | 11 Unit KEE | 100,00 |

3. IKK Luas Ekosistem Yang Dipulihkan

Luas Ekosistem yang Dipulihkan: Total luas ekosistem yang dipulihkan mencapai 29.722,18 hektar. Pemulihan ini dilakukan melalui tiga mekanisme, yaitu:

1. Mekanisme Alam: 22.279,27 ha
2. Rehabilitasi: 2.925,74 ha
3. Restorasi: 4.517,16 ha

Tabel 5. Capaian Luas Ekosistem yang Dipulihkan Tahun 2024 Per UPT

| UPT | Target | Realisasi | Persentase |
|---|--------|-----------|------------|
| 1. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 2. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 3. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 4. Balai Besar Wilayah Sungai Cisilindang | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 5. Balai Besar Wilayah Sungai Ciwayan | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 6. Balai Besar Wilayah Sungai Gura | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 7. Balai Besar Wilayah Sungai Indragiri | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 8. Balai Besar Wilayah Sungai Kapuas | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 9. Balai Besar Wilayah Sungai Mahakam | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 10. Balai Besar Wilayah Sungai Merangin | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 11. Balai Besar Wilayah Sungai Muara Komering | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 12. Balai Besar Wilayah Sungai Pangkal Jendera | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 13. Balai Besar Wilayah Sungai Pesisir Selatan | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 14. Balai Besar Wilayah Sungai Rengas | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 15. Balai Besar Wilayah Sungai Rokan | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 16. Balai Besar Wilayah Sungai Siantan | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 17. Balai Besar Wilayah Sungai Siantan Timur | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 18. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 19. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 20. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 21. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 22. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 23. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 24. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 25. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 26. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 27. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 28. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 29. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 30. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 31. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 32. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 33. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 34. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 35. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 36. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 37. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 38. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 39. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 40. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 41. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 42. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 43. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 44. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 45. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 46. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 47. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 48. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 49. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 50. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Sembakung | 10.000 | 10.000 | 100,00 |

| No. | UPT Penanggung Jawab | Capaian PE 2024 (Ha) | | | |
|-----|----------------------|----------------------|--------------|-----------|-------|
| | | Mekanisme Alam | Rehabilitasi | Restorasi | Total |
| 1 | UPT Pematang Siantar | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 12 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 13 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 14 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 15 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 16 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 17 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 18 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 19 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 20 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 21 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 22 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 23 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 24 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 25 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 26 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 27 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 28 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 29 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 30 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 31 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 32 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 33 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 34 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 35 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 36 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 37 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 38 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 39 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 40 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 41 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 42 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 43 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 44 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 45 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 46 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 47 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 48 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 49 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 50 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 51 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 52 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 53 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 54 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 55 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 56 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 57 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 58 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 59 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 60 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 61 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 62 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 63 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 64 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 65 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 66 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 67 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 68 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 69 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 70 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 71 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 72 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 73 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 74 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 75 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 76 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 77 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 78 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 79 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 80 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 81 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 82 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 83 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 84 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 85 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 86 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 87 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 88 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 89 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 90 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 91 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 92 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 93 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 94 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 95 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 96 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 97 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 98 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 99 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 100 | UPT Bukit Barisan | 100 | 0 | 0 | 100 |



Foto: Panorama di BTN Tanjung Puting

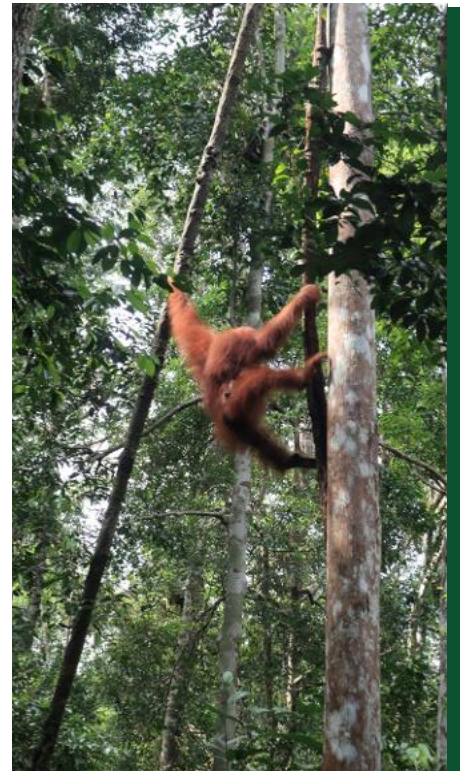


Foto: SM Balairaja



BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan luas ekosistem yang dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem dan luas pengembangan konservasi keanekaragaman hayati di luar hutan konservasi.

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi bertanggung jawab terhadap dua indikator kegiatan, yaitu: 1)

Luas Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA dan TB dan 2) Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan. Berdasarkan Renstra Dit. PEBAB 2025-2029, tahun 2025 merupakan fase untuk penguatan fondasi, data, dan kelembagaan, sehingga akan fokus untuk membangun “grand design” dan memastikan semua aturan norma, standar, prosedur dan kriteria serta data dasar tersedia.

Sesuai Renstra Direktorat PEBAP 2025-2029 Indikator kinerja sasaran strategis Direktorat PEBAP sampai tahun 2029 adalah seperti tersaji dalam Tabel 6. seperti berikut.

Tabel 6. Indikator kinerja sasaran strategis Direktorat PEBAP

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Rincian Output | Pelaksana | Target |
|---|--|----------------|--|-------------------|------------------------------|
| Meningkatnya pemulihan ekosistem, dan pemetaan-pengelolaan areal preservasi | Luas pemulihan ekosistem pada KSA, KPA, dan TB | 300.000 Hektar | Pemulihan Ekosistem Daerah yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB | Direktorat PE-BAP | 1 Rekonstruksi Kebijaksanaan |
| | | | Pemulihan Ekosistem Daerah yang Terdegradasi di KSA, KPA dan TB | UPT TN dan KSDA | 200.000 Hektar |
| | | | Pemeliharaan | UPT TN dan KSDA | 100.000 Hektar |

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Rincian Output | Pelaksana | Target |
|------------------|---|------------------|---|------------------|-------------------------|
| | | | Intervensi Pemulihan Ekosistem Peranan pada KSA, KPA dan TB | UPT, TN dan KSDA | 10.000 Meter persegi |
| | Luas areal preservasi yang dikembangkan | 4.026.000 hektar | Kebijakan Pembinaan Areal Preservasi | Direktorat PEBAP | 1 Rekomendasi Kebijakan |
| | | | fasilitasi Pembinaan Areal Preservasi | UPT, TN dan KSDA | 4.026.000 hektar |

Indikator kinerja sasaran strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam target tahunan seperti tersaji dalam Tabel 7. berikut.

Tabel 7. Indikasi Target dan Lokus IKK Direktorat PEBAP Tahun 2025-2029

| Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2025-2029 | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | |
| | Target (Ha) | Lokus | Target (Ha) | Lokus | Target (Ha) | Lokus | Target (Ha) | Lokus | Target (Ha) | Lokus |
| Luas pemuliharaan ekosistem di KSA, KPA, dan TB | 20.000 | 73 UPT | 70.000 | 73 UPT | 70.000 | 73 UPT | 70.000 | 73 UPT | 70.000 | 73 UPT |
| Luas areal yang dikelola dalam peta areal sebagai Areal Preservasi | 500.000 Ha | 73 UPT | 500.000 Ha | 47 UPT | 400.000 Ha | 73 UPT | 400.000 Ha | 53 UPT | 400.000 Ha | 73 UPT |

Rencana kerja Direktorat PEBAP tahun 2025 diarahkan untuk memberikan dukungan pondasi arah dan kebijakan dalam melanjutkan upaya konservasi dan pemulihan ekosistem dalam bentuk rekomendasi kebijakan dalam mendukung pelaksanaan dua indikator kinerja kegiatan yang secara teknis dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen KSDAE, yaitu:

1. Luas Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA

dan TB seluas 6.297 Ha

2. Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan seluas 301.305 Ha

Rincian target indikator kinerja kegiatan disajikan pada Tabel 8. dan untuk target detail selengkapnya tercantum dalam Lampiran.

Tabel 8. Rincian Target Indikator Kinerja Kegiatan

| Indikator Kinerja Kegiatan | Rincian Output | Pelaksana | Target 2025-2029 | Target 2025 | Anggaran 2025 (Rp.) |
|---|--|-------------------|-------------------------|----------------|---------------------|
| Luas pemeliharaan ekosistem pada KSA, KPA, dan TB | Pemeliharaan Ekosistem Daratan yang terdegradasi di KSA, KPA, dan TB | Direktorat PE-BAP | 5 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi | 1.355.000.000,- |
| | Pemeliharaan Ekosistem Daratan yang terdegradasi di KSA, KPA, dan TB | UPT TN dan KSDA | 200.000 Hektar | 6.278 Hektar | 5.379.007.000,- |
| | Pemeliharaan | UPT TN dan KSDA | 100.000 Hektar | 0 | 0 |
| Luas areal preservasi yang dikembangkan | Intervensi Pemeliharaan Ekosistem Perairan pada KSA, KPA, dan TB | UPT TN dan KSDA | 1 Hektar | 0,2 Hektar | 2.015.752.500,- |
| | Kebijakan Pembinaan Areal Perairan | Direktorat PE-BAP | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi | 1.201.671.000,- |
| | Fasilitasi Pembinaan Areal Preservasi | UPT TN dan KSDA | 4.025.000 Hektar | 301.305 Hektar | 1.027.082.000,- |

Selain target-target utama yang ingin dicapai, terdapat target-target yang terintegrasi lainnya sebagai perbaikan tata kelola (*internal process serta learning and growth*), seperti tersaji pada Tabel 9.



Tabel 9. Target terintegrasi pada Perjanjian Kinerja Direktorat PEBAP

| No. | Sasaran | Indikator | | Target |
|-----|--|-----------|---|----------------|
| 1 | Peningkatan luas ekosistem yang dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem dan luas pengembangan konservasi keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi | 1.1 | Luas Kawasan dengan Kegiatan Pemulihan Ekosistem di KPA, KSA dan TB | 6.297 Ha |
| | | 1.2 | Luas areal preservasi yang dikembangkan | 301.305 Ha |
| 2 | Peningkatan peran masyarakat dalam pemulihan ekosistem | 2.1 | Jumlah orang yang terlibat dalam pemulihan ekosistem | 2.500 Orang |
| 3 | Peningkatan partisipasi <i>stakeholder</i> dalam konservasi keanekaragaman hayati di luar hutan konservasi | 3.1 | Jumlah <i>stakeholder</i> yang berpartisipasi dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati di luar hutan konservasi | 20 Stakeholder |
| | | 3.2 | Jumlah potensi areal preservasi | 20 Unit |
| 4 | Peningkatan jumlah kawasan yang memiliki dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) | 4.1 | Jumlah kawasan dengan rencana pemulihan ekosistem | 10 Kawasan |
| 5 | Tersusunnya NSPK pelaksanaan pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB | 5.1 | Jumlah NSPK pelaksanaan pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB | 1 Dokumen |
| 6 | Tersusunnya NSPK areal preservasi | 6.1 | Jumlah NSPK areal preservasi yang disusun | 1 Dokumen |
| 7 | Peningkatan pemantauan dan evaluasi pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi | 7.1 | Jumlah unit UPT yang dipantau pelaksanaan pemulihan ekosistemnya | 74 UPT |
| | | 7.2 | Jumlah unit UPT yang dipantau pelaksanaan kegiatan pembinaan areal preservasinya | 74 UPT |
| 8 | Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen yang agile, efektif, dan efisien Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi | 8.1 | Nilai SAKIP pada Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi | 82,31 Poin |
| | | 8.2 | Nilai Maturitas SPIP Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi | 3,80 poin |
| 9 | Peningkatan kapasitas SDM dalam pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi | 1 | Jumlah kegiatan bimbingan teknis | 2 Kegiatan |
| 10 | Peningkatan jumlah mitra yang terlibat dalam kegiatan pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi | 10.1 | Jumlah mitra | 30 Mitra |
| 11 | Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN | 11.1 | Jumlah Laporan Keuangan dan BMN yang tertib dan akuntabel | 2 Dokumen |

Total alokasi anggaran yang tersedia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 4.480.640.000. Kegiatan utama dikelompokkan dalam dua program yaitu:

1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Rp 2.649.071.000): Fokus utama program ini adalah Konservasi

Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi.

2. Program Dukungan Manajemen (Rp 1.831.569.000): Program ini mencakup layanan dukungan manajemen internal, seperti pengelolaan data dan informasi, penatausahaan kepegawaian, pengelolaan BMN, layanan perkantoran, dan pengadaan peralatan kantor.

Rincian detail alokasi anggaran disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Rencana Kerja Anggaran Direktorat PEBAP Tahun 2025

| Kode | PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETAIL | Volume | Jumlah Biaya |
|--------------|---|-------------------------------|---------------|
| 143.04.FF | Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan | | 4.480.640.000 |
| 7271 | Konservasi Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi | | 4.480.640.000 |
| 7271.ABV | Kebijakan Bidang Kehutanan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 2.649.071.000 |
| 7271.ABV.001 | Kebijakan Pemulihan Ekosistem yang Terdegradasi | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1.358.000.000 |
| 051 | Penyusunan/Reviu NSPK | | 1.222.042.000 |
| A | Penyusunan / Reviu NSPK Pemulihan Ekosistem | | 888.811.000 |
| B | Bimbingan Teknis Pemulihan Ekosistem | | 5.250.000 |
| C | Koordinasi / Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekosistem | | 299.754.000 |
| E | Verifikasi Data dan Informasi Hasil Pemulihan Ekosistem | | 28.227.000 |
| 052 | Perencanaan dan Bimbingan Teknis Pemulihan Ekosistem | | 135.958.000 |
| A | Penyusunan NSPK Areal Preservasi | | 106.154.000 |
| B | Sosialisasi / Koordinasi Pengelolaan Areal Preservasi | | 29.804.000 |
| 7271.ABV.002 | Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Areal Preservasi | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1.291.071.000 |
| 051 | Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Areal Preservasi | | |
| A | Penyusunan NSPK Areal Preservasi | | 273.787.000 |
| B | Sosialisasi / Koordinasi Pembinaan Areal Preservasi | | 205.283.000 |
| C | Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Ramsar Di Indonesia | | 48.922.000 |
| D | Verifikasi Peta Arah / Indikatif Areal Preservasi | | 27.160.000 |
| F | Dukungan Pengelolaan Pemulihan Ekosistem dan Areal Preservasi | | 300.000.000 |
| E | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem | | 235.958.000 |
| G | Dukungan Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat PE BAP | | 199.961.000 |
| | <u>Belanja Bahan</u> | | 21.275.000 |
| 143.04.WA | Program Dukungan Manajemen | | 219.686.000 |
| 7315 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem | | 219.686.000 |
| 7315.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | 219.686.000 |
| 7315.EBA.962 | Layanan Umum | | |
| 056 | Dukungan Manajemen Direktorat BPPE | | 219.686.000 |

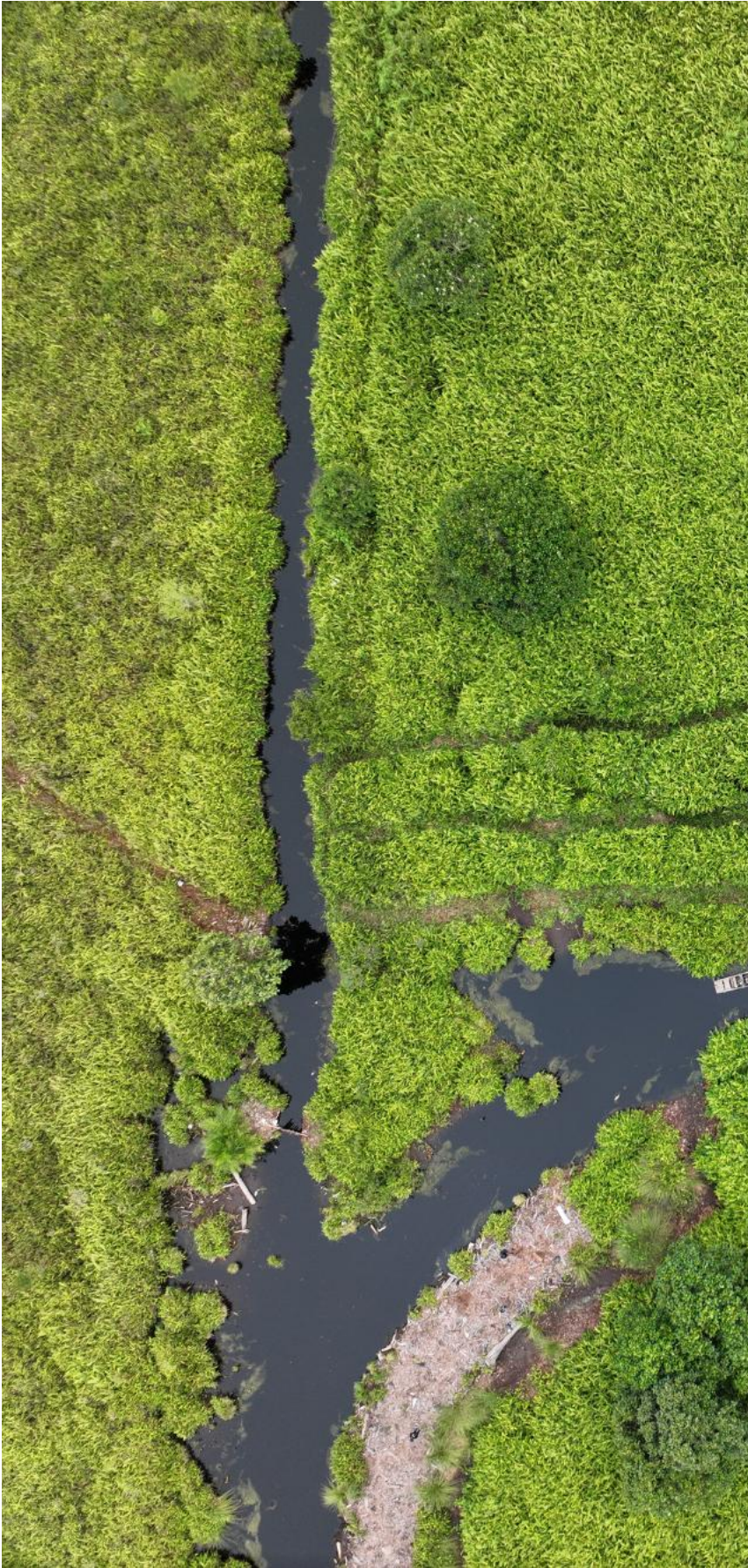
| Kode | PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETAIL | Volume | Jumlah Biaya |
|--------------|---|-----------|---------------|
| A | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat PE BAP | | 206.796.000 |
| B | Penatausahaan Kepegawaian Direktorat PE BAP | | 10.625.000 |
| C | Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Direktorat PE BAP | | 2.265.000 |
| 7315.EBA.994 | Layanan Perkantoran | 1 Layanan | 1.127.640.000 |
| 002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | | 1.127.640.000 |
| F | Belanja Operasional Direktorat PE BAP | | 1.127.640.000 |
| 7315.EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 1 | 484.243.000 |
| 7315.EBB.951 | Layanan Sarana Internal | 1 | 484.243.000 |
| 053 | Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran | | 484.243.000 |
| A | Renovasi Bangunan Kantor Direktorat PEBAP | | 484.243.000 |

Selain dari APBN, langkah-langkah untuk mendorong inovasi skema pembiayaan, seperti kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), blended finance, green finance, serta output based transfer dan hibah ke daerah, juga diupayakan. Beberapa

program yang akan diimplementasikan tahun 2025 diantaranya adalah RBC FOLU NETSINK, FOLUR, kerjasama kegiatan lain yang mendukung pembiayaan lingkup Ditjen KSDAE seperti InFlores dan GIZ Forclime serta mitra strategis KSDAE Lainnya.



Foto: TN Tesso Nilo



BAB IV

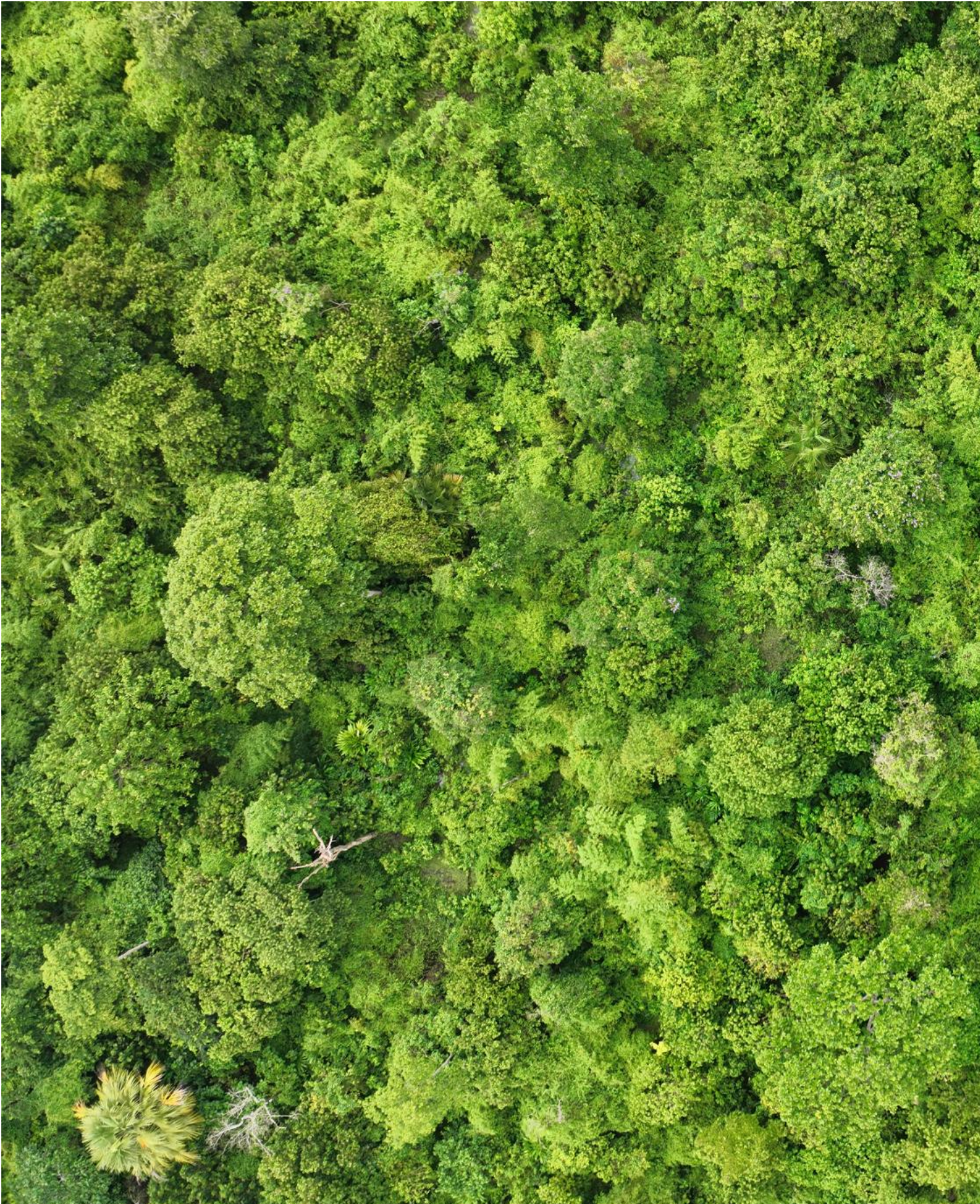
PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat PEBAP Tahun 2025 merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan bidang pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi tahun 2025. Rencana Kerja ini merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 lingkup Direktorat PEBAP.

Rencana Kerja Direktorat PEBAP Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta mencakup kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang KSDAE. Tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program, kegiatan beserta seluruh indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan

pencapaiannya, perlu mendapat perhatian secara serius agar mandat yang diberikan oleh negara dan masyarakat dapat dicapai secara optimal dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab Direktorat PEBAP kepada masyarakat.

Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian secara serius adalah adanya kemungkinan adanya perbedaan antara kondisi eksisting regulasi dan kelembagaan di lingkungan Direktorat PEBAB dengan kebutuhan nyata untuk memenuhi mandat yang telah diberikan. Hal-hal tersebut perlu mendapat prioritas dalam penanganannya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip relevan, efektif, efisien, fleksibel, dan bermanfaat.





LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Target dan Alokasi Anggaran Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Areal Preservasi Tahun 2025.

| No | UPT Penanggung Jawab | Target Luasan (Ha) | Target setelah Efisiensi |
|---------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| BBKSDA/BKSDA | | | |
| 1 | BKSDA DKI JAKARTA | 75,46 | 75,46 |
| 2 | BBKSDA JAWA BARAT | 200,02 | 0,00 |
| 3 | BKSDA JAWA TENGAH | 7.340,05 | 2.500,00 |
| 4 | BBKSDA JAWA TIMUR | 1.551,60 | 0,00 |
| 5 | BKSDA ACEH | 1.586,09 | 1.586,09 |
| 6 | BBKSDA SUMATERA UTARA | 36.644,19 | 36.644,19 |
| 7 | BKSDA SUMATERA BARAT | 28.949,55 | 15.808,63 |
| 8 | BBKSDA RIAU | 5.135,97 | 5.135,97 |
| 9 | BKSDA JAMBI | 40.153,21 | 0,00 |
| 10 | BKSDA SUMATERA SELATAN | 26.121,39 | 26.121,39 |
| 11 | BKSDA KALIMANTAN BARAT | 17.955,00 | 11.544,00 |
| 12 | BKSDA KALIMANTAN SELATAN | 34.293,57 | 10.000,00 |
| 13 | BKSDA SULAWESI UTARA | 3.321,24 | 1.200,00 |
| 14 | BKSDA SULAWESI TENGAH | 47,39 | 25,00 |
| 15 | BBKSDA SULAWESI SELATAN | 59.871,30 | 59.871,30 |
| 16 | BKSDA SULAWESI TENGGARA | 25.616,35 | 1.500,00 |
| 17 | BKSDA MALUKU | 380,30 | 380,30 |
| 18 | BKSDA BALI | 65,59 | 65,59 |
| 19 | BKSDA NUSA TENGGARA BARAT | 26.370,39 | 0,00 |
| 20 | BKSDA BENGKULU | 35.671,09 | 300,00 |
| 21 | BBKSDA NUSA TENGGARA TIMUR | 511,18 | 0,00 |
| 22 | BBKSDA PAPUA | 38.229,60 | 400,00 |
| 23 | BBKSDA PAPUA BARAT DAYA | 299,98 | 100,00 |
| 24 | BKSDA KALIMANTAN TENGAH | 127.956,78 | 127.956,78 |
| 25 | BKSDA KALIMANTAN TIMUR | 9.504,70 | 0,00 |
| 26 | BKSDA D.I. YOGYAKARTA | 146,55 | 90,00 |
| Jumlah | | 527.998,54 | 301.304,70 |

LAMPIRAN 2

Target dan Alokasi Anggaran Kegiatan Pemulihan Ekosistem Tahun 2025

| NO | SATUAN KINERJA | PAGU APBN KSDAE | |
|----|----------------------------------|-----------------|---------------|
| | | Target (Ha) | Anggaran (Rp) |
| 1 | BBKSDA Jawa Barat | 90 | 109.700.000 |
| 2 | BBKSDA Nusa Tenggara Timur | 20,67 | 25.300.000 |
| 3 | BBKSDA Papua | 50 | 120.340.000 |
| 4 | BBKSDA Papua Barat | 474 | 370.000.000 |
| 5 | BBKSDA Sulawesi Selatan | 500 | 273.535.000 |
| 6 | BBKSDA Sumatera Utara | 10 | 37.500.000 |
| 7 | BBTN Bukit Barisan Selatan | 160 | 230.320.000 |
| 8 | BBTN Gunung Bromo Tengger Semeru | 100 | 175.635.000 |
| 9 | BBTN Gunung Gede Pangrango | 10 | 22.280.000 |
| 10 | BBTN Kerinci Seblat | 1050 | 279.910.000 |
| 11 | BBTN Lore Lindu | 80 | 13.180.000 |
| 12 | BBTN Teluk Cendrawasih | 5,01 | 116.900.000 |
| 13 | BKSDA Bengkulu | 15 | 18.000.000 |
| 14 | BKSDA Jakarta | 2 | 19.785.000 |
| 15 | BKSDA Jawa Tengah | 10 | 13.500.000 |
| 16 | BKSDA Kalimantan Barat | 20 | 62.950.000 |
| 17 | BKSDA Kalimantan Selatan | 50 | 154.500.000 |
| 18 | BKSDA Kalimantan Tengah | 30 | 245.945.000 |
| 19 | BKSDA Maluku | 200 | 73.000.000 |
| 20 | BKSDA Sulawesi Tenggara | 1 | 16.000.000 |
| 21 | BKSDA Sulawesi Utara | 70 | 38.965.000 |
| 22 | BKSDA Sumatera Barat | 158,68 | 108.470.000 |
| 23 | BKSDA Sumatera Selatan | 630 | 238.400.000 |
| 24 | BTN Aketajawe Lolobata | 24,2 | 30.000.000 |
| 25 | BTN Bali Barat | 3 | 4.100.000 |
| 26 | BTN Baluran | 200 | 35.000.000 |
| 27 | BTN Batang Gadis | 500 | 273.535.000 |
| 28 | BTN Berbak Sembilang | 200 | 201.020.000 |
| 29 | BTN Bogani Nani Wartabone | 50 | 134.545.000 |
| 30 | BTN Bukit Baka Bukit Raya | 50 | 61.000.000 |
| 31 | BTN Bukit Dua Belas | 100 | 24.630.000 |
| 32 | BTN Bukit Tiga Puluh | 75 | 98.640.000 |
| 33 | BTN Bunaken | 0,02 | 118.715.000 |
| 34 | BTN Gunung Ciremai | 20 | 57.780.000 |
| 35 | BTN Gunung Merapi | 20 | 15.340.000 |
| 36 | BTN Gunung Merbabu | 25 | 30.500.000 |
| 37 | BTN Gunung Palung | 100 | 210.969.000 |
| 38 | BTN Gunung Rinjani | 10 | 31.440.000 |
| 39 | BTN Karimunjawa | 0,01 | 66.700.000 |
| 40 | BTN Kepulauan Seribu | 0,02 | 181.417.000 |
| 41 | BTN Kepulauan Togean | 25,01 | 110.850.000 |
| 42 | BTN Komodo | 93 | 100.000.000 |
| 43 | BTN Kutai | 18 | 275.058.000 |
| 44 | BTN Lorentz | 100 | 85.750.000 |

| NO | SATUAN KINERJA | PAGU APBN KSDAE | |
|--------------|--|-----------------|-------------------------|
| | | Target (Ha) | Anggaran (Rp) |
| 45 | BTN Manupeu Tanah Daru Laiwangi Wanggameti | 25 | 56.250.000 |
| 46 | BTN Manusela | 50 | 61.000.000 |
| 47 | BTN Meru Betiri | 300 | 145.000.000 |
| 48 | BTN Rawa Aopa Watumohai | 400 | 245.000.000 |
| 49 | BTN Sebangau | 0 | 0 |
| 50 | BTN Siberut | 12,37 | 27.696.000 |
| 51 | BTN Taka Bonerate | 4 | 1.319.171.500 |
| 52 | BTN Tambora | 10 | 19.775.000 |
| 53 | BTN Tesso Nilo | 37 | 45.424.000 |
| 54 | BTN Ujung Kulon | 300 | 367.000.000 |
| 55 | BTN Wakatobi | 7 | 11.000.000 |
| 56 | BTN Wasur | 150 | 185.000.000 |
| 57 | BBKSDA Jawa Timur | 0 | 0 |
| 58 | BBKSDA Riau | 0 | 0 |
| 59 | BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum | 0 | 0 |
| 60 | BBTN Gunung Leuser | 0 | 0 |
| 61 | BKSDA Aceh | 0 | 0 |
| 62 | BKSDA Bali | 0 | 0 |
| 63 | BKSDA Jambi | 0 | 0 |
| 64 | BKSDA Kalimantan Timur | 0 | 0 |
| 65 | BKSDA Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 |
| 66 | BKSDA Sulawesi Tengah | 0 | 0 |
| 67 | BKSDA Yogyakarta | 0 | 0 |
| 68 | BTN Alas Purwo | 0 | 0 |
| 69 | BTN Bantimurung Bulusaraung | 0 | 0 |
| 70 | BTN Gunung Halimun Salak | 0 | 0 |
| 71 | BTN Kayan Mentarang | 0 | 0 |
| 72 | BTN Kelimutu | 0 | 0 |
| 73 | BTN Tanjung Puting | 0 | 0 |
| 74 | BTN Way Kambas | 0 | 0 |
| TOTAL | | 6.644,99 | 7.393.420.500,00 |

